

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2015:16-24)

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan adalah masalah multidimensional, sehingga upaya-upaya penurunan jumlah penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif, melalui berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan terpadu (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Masalah kritis dalam pembangunan ekonomi adalah pemberantasan kemiskinan absolut dan disparitas pendapatan. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mengurangi kemiskinan adalah tujuan yang selaras. Tingkat kemiskinan absolut adalah jumlah penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dengan garis kemiskinan yakni orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 sehari atau \$ 2 per hari (Todaro & Smith, 2015:212-235).

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan. Dengan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia menjadi salah satu tujuan tercapainya masyarakat adil dan makmur, sehingga kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan khusus daerah relatif tertinggal. Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan namun belum menghasilkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu supaya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dengan tuntas (Aziz et al., 2016).

Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi kekuatan ekonomi di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam melimpah mulai dari pertanian, pertambangan, perairan, sumber daya manusia dan keahlian pengolahan akan menjadi faktor pendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan menciptakan kesejahteraan bukan hanya di kawasan ini, tetapi seluruh bangsa. Meskipun memiliki potensi kekuatan ekonomi, kawasan tersebut mengalami ketertinggalan pembangunan yang menjadi sumber pemicu masalah ketidakadilan dan penurunan kesejahteraan, daerah yang tertinggal, rendahnya aktivitas pasar ekonomi, rendahnya modal dan penurunan produktivitas. Permasalahan pengentasan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menjadi penting dengan kondisi kemiskinan yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel I-1 memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin Kawasan Timur Indonesia 2015-2019 (dalam ribu jiwa)

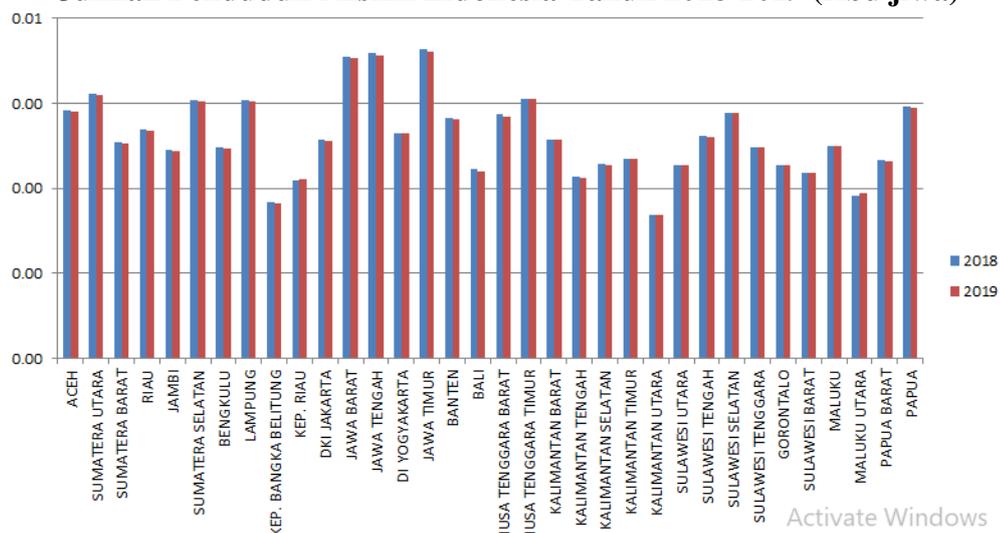
Daerah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	802,29	786.58	748.12	189.05	188.6
Nusa Tenggara Timur	1160.53	1150.08	1134.74	413.49	404.03
Sulawesi Utara	217.15	200.35	194.85	779.64	759.58
Sulawesi Tengah	406.34	413.15	423.27	301.85	299.97
Sulawesi Selatan	864.51	796.81	825.97	188.3	184.71
Sulawesi Tenggara	345.02	327.29	313.16	152.83	151.87
Gorontalo	206.51	203.69	200.91	317.84	319.51
Sulawesi Barat	153.21	146.9	149.47	81.93	87.18
Maluku	327.78	331.79	320.42	213.67	207.59
Maluku Utara	72.65	76.4	78.28	915.22	900.95
Papua Barat	225.54	223.6	212.86	735.62	705.68
Papua	898.21	914.87	910.42	1134.11	1129.46
Jumlah	5679.74	5571.51	5512.47	5423.55	5339.13

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)

Berdasarkan Tabel I-1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2015-2019 secara umum mengalami penurunan dari sisi jumlahnya, yang disebabkan karena semakin terdistribusi nya pendapatan pada Kawasan Timur Indonesia. Jumlah Penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 5.339,13 ribu jiwa, hal tersebut menggambarkan adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan karena kebijakan program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah pada 4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018-2019 berhasil mengalami penurunan yang cukup banyak namun, di beberapa provinsi masih cukup tinggi, seperti di Provinsi Papua pada tahun 2019 mencapai 1.129,46 ribu

jiwa, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 915,22 ribu jiwa dan pada Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 759,58 ribu jiwa pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat Kemiskinan di Indonesia. Setiap wilayah pasti berusaha menurunkan tingkat kemiskinan, dalam kurun waktu 2015-2019, provinsi Kawasan Timur Indonesia hanya mampu menurunkan kemiskinan rata rata sebesar 0,19 persen pertahun. Dari Tabel I-1 penurunan kemiskinan bersifat lamban menyebabkan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Gambar I-1 memperlihatkan Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Indonesia periode 2014-2018.

Gambar I.1
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2018-2019 (ribu jiwa)



Berdasarkan Gambar I-1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, sebagian besar terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) di wilayah Sumatra dan Jawa. Hal tersebut merupakan pernyataan yang wajar karena mengingat lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di pulau tersebut. Namun, apabila dilihat tingginya tingkat kemiskinan di wilayah

Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih mendominasi dengan tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan kemiskinan terendah ada pada provinsi Maluku Utara, namun masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari pada wilayah Kawasan Barat Indonesia lainnya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya pembangunan yang berkonsentrasi di wilayah-wilayah tertinggal.

Bappenas (2018) menyampaikan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh sulitnya akses layanan dasar secara umum, kurangnya fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, pola pikir dengan mementingkan upacara adat dan mengorbankan kebutuhan pendidikan dan gizi yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia, pola pikir yang tidak berkembang, mempengaruhi produktivitas masyarakat. Ditambah dengan faktor topografi wilayah yang menyebabkan wilayah tersebut terisolasi, sulitnya mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, hingga pelayanan dasar masyarakat dan kejadian bencana memperparah kondisi kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki hubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin, dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah akan menurunkan kemiskinan, dengan adanya kemudahan dalam mengakses pendidikan lebih banyak masyarakat yang mengenyam dan menyelesaikan pendidikan, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula pengetahuan dan kualitas masyarakat sehingga, menunjang peningkatan produktivitas, hal tersebut sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa semakin berkualitas pendidikan tenaga kerja semakin memiliki daya saing yang dapat diserap oleh

lapangan pekerjaan sehingga, memiliki peningkatan pada standar hidup ekonomi. Begitu pula pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, semakin sehat masyarakatnya maka semakin baik pula produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa, maka terjadi peningkatan output sehingga meningkatkan standar ekonomi masyarakat. (Mankiw, 2016:242-243; Widodo et al., 2012).

Faktor ekonomi lain yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah investasi. Investasi masyarakat yang dilakukan dalam negeri atau asing secara merata akan memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Dengan adanya peningkatan investasi memberikan peluang kesempatan kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja, meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan (Rarun et al., 2018).

Islami (2019) menemukan upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Peningkatan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Penggunaan tenaga kerja akan dibatasi dan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan.

Basorudin (2019) menemukan jumlah penduduk miskin dipengaruhi secara negatif oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah, akan semakin banyak pula penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya - mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan dipengaruhi secara positif oleh ketimpangan pendapatan. Semakin kecil ketimpangan distribusi pendapatan maka semakin baik pemerataan pendapatan di masyarakat dan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Rozali, 2020).

Permasalahan jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia menjadi penting karena, jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia secara umum mengalami penurunan namun, dari tahun ke tahun masih memiliki angka yang relatif tinggi. Sehingga pengembangan ekonomi di wilayah Kawasan Timur Indonesia harus lebih inklusif dengan memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal dari sumber daya alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian ini akan mengamati pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum regional, investasi dan indeks gini terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum regional, investasi dan indeks Gini terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2018.

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui arah dan besarnya pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, tingkat

partisipasi angkatan kerja, upah minimum regional, investasi dan indeks Gini terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2018.

D. Manfaat Penelitian

Bagi otoritas kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan salah satu acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Model ekonometrik yang digunakan, merupakan modifikasi dari penelitian Rizky (2019) dan Novita (2014), dengan formulasi akhir model ekonometrik sebagai berikut :

$$\log JPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PPBP_{it} + \beta_2 \log PPBK_{it} + \beta_3 \log INV_{it} + \beta_4 \log UMR_{it} \\ + \beta_5 TPAK_{it} + \beta_6 IG_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

<i>JPM</i>	= Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
<i>PPBP</i>	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (rupiah)
<i>PPBK</i>	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (rupiah)
<i>TPAK</i>	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
<i>UMR</i>	= Upah Minimum Regional (rupiah)
<i>INV</i>	= Investasi (rupiah)
<i>IG</i>	= Indeks Gini (Angka Indeks 0-1)
<i>log</i>	= Operator logaritma berbasis <i>e</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_6$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Provinsi ke <i>i</i>
<i>t</i>	= tahun ke <i>t</i>
ε	= unsur kesalahan

E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara *time series* dan data *cross section*. Data *time series* meliputi periode 2010 sampai dengan 2018, data *cross section* meliputi 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Data yang digunakan adalah jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum regional, investasi, indeks gini dan kemiskinan. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Portal data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis serta data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BABI: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur

Indonesia. Hasil- hasil penelitian terdahulu terkait kemiskinan. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

BABIII: METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi secara kuantitatif dan secara ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi penelitian yang selanjutnya.